

**RANCANG BANGUN *WEBGIS* MANAJEMEN ASET PEMERINTAH
DAERAH
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

REGINA PUTRI HANDAR MUMPUNI

NIT. 19283320

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Regional Property is an asset that is managed by the Asset Sector at the Office of the Regional Finance and Asset Agency which has authority and responsibility in planning strategies for optimizing assets, developing and increasing the economic value of these assets in order to support regional economic resources. The asset management strategy must be aligned with the supervisory function to mitigate problems that occur, especially in land assets that are vulnerable to boundary and location disputes. However, in reality, in the field of land and building assets owned by the Regional Government, optimal security has not been carried out, this has resulted in control by other parties or individuals. Limited information regarding the location of the asset sector is one of the causes of the less than optimal security of these assets.

To deal with this, the strategy carried out is through the development of a webgis that can present information on the distribution of land parcels owned by local government assets. This study aims to integrate land data, namely spatial data and textual data with government asset data, namely the nominative list of Goods Inventory Cards (KIB) A Land. The integration of the data is presented via webgis. This study uses research and development research methods. Data collection techniques were carried out through interviews, document studies and questionnaires. The results of this study are in the form of a webGIS design that presents the distribution of local government asset land parcels along with their spatial and textual information.

The implementation of the webGIS is designed to be able to present an attractive user interface, be able to integrate land databases and asset data, make it easy to find plot locations in the field with a connection to Google Maps, make it easy to find land parcels using the search feature and be able to print textual data from each - each plot of land.

Keywords: *webgis*, asset management, local government, data integration

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	7
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	15
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	20
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	21
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	23
F. Alat dan Bahan.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Kecamatan Tarutung.....	31
B. Data Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.....	32
BAB V RANCANG BANGUN <i>WEBGIS</i> MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH.....	34
A. Perancangan <i>Webgis</i>	34
B. Pembangunan Basis Data.....	38
C. Penyajian <i>Webgis</i> dari Basis Data Spasial dan Basis Data Tekstual.....	46
D. Uji Coba dan Evaluasi <i>Webgis</i>	55
BAB VI MANFAAT PERANCANGAN <i>PROTOTYPE WEBGIS</i>	60
BAB VII PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang ditentukan oleh UU untuk kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah ialah diberikan hak untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan aset atau BMD yang dikelola daerah harus mengedepankan konsep pengelolaan maksimal berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada pada aset tersebut. Dari strategi pengelolaan aset yang baik akan menciptakan nilai tambah dan berdampak kepada pemerintah daerah sebagai sumber penggerak ekonomi dan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang merupakan aturan pokok dalam inventarisasi barang pemerintah daerah. BMD atau aset milik daerah merupakan aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau metode perolehan yang sah lainnya. Pengelolaan BMD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa dari otonomi daerah yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan yang optimal dan pengawasan secara

menyeluruh. Kegiatan manajemen aset milik pemerintah daerah dikelola oleh Bidang Aset di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan sebagai pengelola BMD yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam strategi perencanaan optimalisasi aset, pengembangan dan meningkatkan nilai ekonomis dari aset tersebut demi menunjang sumber ekonomi daerah. Strategi pengelolaan aset harus selaras dengan fungsi pengawasan untuk memitigasi permasalahan yang terjadi, terutama pada aset Tanah yang rentan akan sengketa batas dan lokasi. Pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dijelaskan bahwasannya aset tetap adalah aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan pemerintah seperti tanah, peralatan dan mesing, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang nilai perolehannya dapat diukur secara andal, tidak diperjual-belikan (Purba & Aziza 2019).

Strategi pengelolaan BMD yang baik menjadi kunci dan mendapat perhatian khusus bagi pemerintah sebagai upaya dalam menunjang kegiatan operasional pemerintahan karena menjadi salah satu sumber dana daerah. Hal tersebut guna mencapai pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan tata kelola Barang Milik Daerah secara baik dan memperhatikan pertimbangan dari berbagai aspek seperti, inventarisasi, pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan aset. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan aset yang ada secara baik agar terciptanya aset yang bernilai tinggi dan memberikan kontribusi kepada daerah.

Pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki target Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Daerah sebanyak 211 bidang. Kecamatan Tarutung merupakan salah satu kecamatan yang menjadi target dari kegiatan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Daerah. Hasil dari kegiatan berupa sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut

merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan dan manajemen aset daerah. Dengan melakukan inventarisasi, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi spasial dan kondisi di lapangan dari suatu aset tetap (tanah dan bangunan). Hal tersebut juga memberikan gambaran dalam pengelolaan aset sehingga aset dapat digunakan secara optimal. Aspek pemeliharaan dan pengamanan aset juga harus diperhatikan, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara bahwasannya di lapangan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah belum dilakukan pengamanan yang optimal, hal tersebut menyebabkan adanya penguasaan oleh pihak lain atau oknum. Keterbatasan informasi terkait lokasi bidang aset menjadi salah satu penyebab dari kurang optimalnya pengamanan aset – aset tersebut. Terkait dengan hal tersebut, strategi untuk mengatasi permasalahan penelitian diperlukan instrumen untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen aset yaitu dengan mengintegrasikan data pertanahan yaitu data spasial dan data tekstual seperti data peta pendaftaran bidang tanah, data peta penggunaan tanah, data peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan data aset pemerintah yaitu daftar nominatif Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Integrasi dari data tersebut digunakan untuk menjadi basis data pertanahan dan disajikan melalui *webgis*, sehingga, pemerintah dapat lebih mudah mengakses data dan informasi yang berkaitan dengan aset tetap (tanah dan bangunan) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penelitian ini bertujuan untuk membangun ketersediaan dan sinkronisasi data dalam bentuk *Webgis*. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memperoleh informasi data aset yang terintegrasi dengan informasi spasial dalam bentuk data digital. Tujuan pembangunan *webgis* ini sebagai instrumen dalam mempermudah pengelolaan dan manajemen aset pemerintah daerah dengan memberikan gambaran hubungan antara subjek dan objek serta informasi spasial yang

tersimpan dalam peta. Basis data ini juga menertibkan administrasi pertanahan pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk informasi pertanahan (Ramadani 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul : “**Rancang Bangun Webgis Manajemen Aset Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pendaftaran dan pemetaan bidang tanah aset Pemerintah Daerah telah menghasilkan data spasial maupun data tekstual. Data spasial dan data tekstual yang lengkap tersebut seharusnya dapat dilakukan pemeliharaan data pertanahan. Hal tersebut seharusnya sejalan dengan adanya pengelolaan dan manajemen aset Pemerintah Daerah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber dana untuk menunjang perekonomian daerah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, di lapangan masih ditemukan aset Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh pihak lain baik itu oknum masyarakat maupun instansi lainnya. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi terkait lokasi dari aset – aset tersebut sehingga aset tersebut belum dilakukan pengamanan dan optimalisasi aset. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan membangun basis data terintegrasi antara data pertanahan dan data aset Pemerintah Daerah. Data yang telah terintegrasi dapat memberikan informasi spasial dan tematik pada suatu bidang tanah. Untuk mempermudah penyajian data terintegrasi, maka peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk *webgis*. Integrasi data tersebut menjadi basis data dalam rancangan *webgis* untuk membuat suatu *prototype* sebagai instrumen dalam mempermudah manajemen aset di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan adanya rancangan *webgis* tersebut, diharapkan menjadi referensi antara kedua instansi dalam penyusunan kebijakan dan sebagai landasan dalam melaksanakan optimalisasi aset.

C. Batasan masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah sehingga dapat terfokus pada masalah yang dihadapi dalam membangun sistem informasi. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. *Webgis* yang dibuat dengan model *prototype* sebagai inovasi dalam mengintegrasikan data pertanahan dan data aset pemerintah daerah di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pengolahan data dilakukan hanya untuk status hak atas tanah milik pemerintah daerah yaitu Hak Pakai.
3. Basis data yang digunakan adalah data Peta Bidang Tanah aset pemerintah, data Peta Penggunaan Tanah, data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR), data Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui :

- a. Merancang *prototype webgis* manajemen aset dengan mengintegrasikan data Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah.
- b. Mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari rancangan *webgis* terhadap Kabupaten Tapanuli Utara sebagai instrumen untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen aset.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Kantor Pertanahan Tapanuli Utara

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan dalam membangun basis data pertanahan yang terintegrasi dengan data aset milik pemerintah daerah. Basis data tersebut yaitu dengan menyusun informasi spasial dan data tekstual dalam mewujudkan integrasi data antar instansi pemerintah. Untuk selanjutnya hasil penelitian ini menjadi pedoman/acuan dalam membangun basis data

pertanahan yang terintegrasi dengan data aset pemerintah daerah di Kabupaten yang lain.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai masukan dan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan dan manajemen aset sebagai upaya optimalisasi aset dan memberikan kepastian hukum atas aset tersebut.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan *prototype webgis* manajemen aset pemerintah daerah dibangun dengan integrasi data spasial hasil sertifikasi bidang aset milik Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan data spasial berupa Peta RTRW Tahun 2017 – 2037, Peta RDTR Tahun 2021 – 2041 dan data penggunaan lahan eksisting yang sesuai dengan di lapangan. Data – data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk *webgis* setelah proses pengolahan data. Data tekstual yang diperoleh dari Kantor BKAD Tapanuli Utara dapat dilakukan integrasi data berdasarkan *primary key* yaitu nomor hak untuk dilakukan penggabungan data. Perancangan *prototype webgis* dilakukan dengan tahapan analisis kebutuhan pengguna dan sistem, pembangunan basis data dan penyajian *webgis* dan dilakukan uji coba oleh *user* untuk memberikan penilaian terhadap *webgis* yang sudah dirancang.
2. Penilaian yang dilakukan oleh 11 (sebelas) responden dari Kantor Pertanahan dan BKAD Tapanuli Utara diperoleh nilai sebesar 94% dengan kategori sangat baik. Penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *webgis* yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sistem dan bermanfaat bagi kedua instansi tersebut. Hal ini memudahkan bagi pihak Kantor Pertanahan dan BKAD dalam melakukan monitoring persebaran bidang aset milik Pemerintah Daerah serta mewujudkan tata tertib administrasi pertanahan yang baik. Informasi yang tersaji memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam melakukan optimalisasi atau legalisasi aset untuk kepentingan negara dan masyarakat.

B. Saran

1. Basis data pertanahan yang dibangun dan ditampilkan masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dengan memberikan informasi terkait visual

dari lingkungan bidang aset tersebut serta untuk melakukan perubahan data diperlukan strategi yang memudahkan dalam *editing* dan *updating* data.

2. Peneliti berharap *prototype webgis* ini dapat diterapkan di kecamatan lain, sehingga informasi yang tersedia lebih detail dan mencakup keseluruhan persebaran bidang aset milik Pemerintah Daerah.
3. Diperlukan adanya kerjasama secara khusus bagi kedua instansi untuk melakukan sinergitas data, sehingga kemudahan dalam mengakses data dan memonitoring data untuk mewujudkan tertib administrasi dan data yang dihasilkan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Pengertian Skala Likert, Cara Penggunaan dan Contoh' 2022, *Sampoerna University*, 11 Februari, dilihat pada 10 April 2023, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/>.
- Abdullah, H 2009, 'Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru menuju kota terkemuka di Indonesia'. Jakarta:Raya Merdeka Books.
- Andriyan, W, Septiawan, S, Aulya, A 2020, 'Perancangan *website* sebagai media informasi dan peningkatan citra pada smk dewi sartika tangerang', *Jurnal Teknologi Terpadu*, vol 6 no 2, hlm 79 – 88.
- Baary, E, A, Yuwono & Doyo B 2012, 'Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Berdasarkan Jenis – Jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Studi Kasus Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya)', *GEOID*, vol 8 no 1, hlm 39 – 46.
- Cahyono 2017, 'Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan di Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dewi, N,L,A,M,R, Hartati, R, S & Divayana Y 2021, 'Penerapan metode *prototype* dalam perancangan sistem informasi penerimaan karyawan berbasis *website* pada berlian agency', *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol 20 no 1.
- Fajrillah, Ardiansyah, R, Andini,T, Juliani, R, Putri, M, T, & Idris, I 2022, 'Sistem informasi geografis pemetaan lokasi wisata di sumatera barat berbasis webgis menggunakan QGIS', *Jurnal Multimedia dan Teknologi Informasi*, vol 4 no 1.
- Fikriansyah, I 2023, 'Kuisisioner adalah metode pengumpulan data', *Detik Bali*, 23 Februari, dilihat pada 10 April 2023, <https://www.detik.com/bali/>.
- Firzada, M, I 2021, 'Perspektif pengelolaan barang milik daerah (bmd) sebagai modal awal pembangunan nasional'kementerian keuangan, 26 Agustus, dilihat pada 11 Agustus 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak>.

- Fridayanthie, E, W, Haryanto & Tsabitah, T 2021, 'Penerapan metode *prototype* pada perancangan sistem informasi penggajian karyawan (persis gawan) berbasis web' *Paradigma*, vol 23, no 2.
- Hanafi 2017, 'Konsep penelitian r&d dalam bidang pendidikan', *Jurnal Kajian Keislaman*, vol 4 no 2.
- Hardiansyah & Dewi 2020, 'Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar (SIPATUBEL) Pada Kementerian Pertahanan, Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)', Jakarta.
- Harsono, B 1997, Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu, dalam Kumpulan Seminar nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, STPN, Jakarta.
- Hayati 2019, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Studi di Kantor Pertanahn Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Indarto 2013, 'Sistem informasi geografis'. Yogyakarta:PT Graha Ilmu.
- Lestari 2021, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Pontianak (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Maharani, R,A, Utoyo,B, Sulistio,E,B 2020, 'Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)', *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, vol 2 no 3.
- Martiana 2021, 'Perancangan Webgis Informasi Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Pola Tri Juang Di Kota Mojokerto (Studi di Kelurahan Blooto, Kecamatan PrajuritKulon, Kota Mojokerto) Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Nufalivata F, Yanuarsyah I & Kamilah N 2019, 'Perancangan sistem informasi manajemen aset berbasis webgis studi kasus di Kota Bogor'.
- Nugraha 2022, 'Perancangan Webgis Informasi Pertanahan Guna Pengembangan Multipurpose Cadastre Di Kota Madiun (Studi Di Kelurahan Demangan Kota Madiun) Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pinuji, S 2016, 'Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan *one map policy*', *Jurnal Bhumi*, vol 2 no 1.
- Prahasta, E 2002, 'Konsep – konsep dasar sistem informasi geografis'. Bandung: PT. Informatika.
- Prahasta, E 2005, 'Sistem informasi geografis'. Bandung: PT. Informatika.
- Pranatawijaya, V, H, Widiatry, Priskila, R & Putra, P, B, A, A 2019, 'Penerapan skala likert dan skala dikotomi pada kuisisioner online', *Jurnal Sains dan Informatika* vol 5 no 2.
- Purba & Aziza 2019, 'Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah' *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, vol 9 no 2.
- Purnomo, D 2017, 'Model *prototyping* pada pengembangan sistem informasi' *Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan*, vol 2, no 2.
- Ramadanu 2020, 'Membangun Basis Data Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rachmaniah, M 2018, *Pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi*, IPB Press, Bogor.
- Santoso 2013, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah', *Jurnal Dinamika Hukum* vol 13 no 1.
- Saputro 2016, 'Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna di Kabupaten Karanganyar', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiyono 2016, 'Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D'. Bandung:PT Alfabeta.

- Taluke, D, Lakat, R, S, M & Amanda, S 2019, 'Analisis preferensi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir pantai kecamatan loloda kabupaten halmahera barat', *Jurnal Spasial* vol 6 no 2.
- Umar, Haryono & Purba, Rahima 2018, 'The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports', *International Journal of Civil Engineering and Technology*. 9. 1506-1589.
- Utama, T, C 2020, 'Pengelolaan Informasi Tanah Aset Instansi Pemerintah Melalui Pembuatan Basis Data Terintegrasi di Kantor Pertanahan Kota TanjungPinang', *Laporan Aksi Perubahan*.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037.

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sipoholon, Tarutung dan Siatas Barita Tahun 2021 – 2041

LAMPIRAN